

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Landasan Teori

1. Teori Keuangan

a. Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) merupakan salah satu kerangka konseptual dalam akuntansi dan studi organisasi yang menjelaskan hubungan antara organisasi dengan masyarakat luas. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) pertama kali dikembangkan dari konsep legitimasi organisasi yang berasal dari karya awal Dowling dan Pfeffer (1975). Organisasi harus beroperasi dalam batas-batas dan norma yang dapat diterima secara sosial agar terus memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi dipandang sebagai suatu persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas sesuai dengan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat.

Menurut teori ini, keberlangsungan sebuah organisasi bergantung pada penerimaan atau "legitimasi" yang diberikan oleh masyarakat (Suchman, 1995). Legitimasi adalah persepsi bahwa tindakan-tindakan organisasi dapat diterima dan sesuai dengan sistem nilai sosial yang berlaku. Oleh karena itu, organisasi secara aktif berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Dalam konteks perusahaan, legitimasi sering dibangun melalui berbagai aktivitas yang menunjukkan komitmen terhadap kepentingan publik, seperti pengungkapan informasi CSR.

Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat menimbulkan ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Meskipun secara hukum tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal melalui celah-celah regulasi perpajakan, masyarakat dapat memandang praktik tersebut sebagai tidak etis dan bertentangan dengan semangat kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak sering kali meningkatkan pengungkapan CSR untuk mengimbangi potensi dampak negatif terhadap citra mereka (Lanis & Richardson, 2012). CSR digunakan sebagai alat legitimasi strategis untuk memperoleh atau mempertahankan dukungan sosial, terutama dari pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat, pemerintah, dan media. Dalam hal ini, teori legitimasi menjelaskan bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomis dan sosial demi mempertahankan eksistensinya.

Lebih lanjut, kinerja CSR menjadi bagian dari strategi komunikasi organisasi untuk menjaga legitimasi di mata publik. Perusahaan tidak hanya menjalankan program CSR, tetapi juga secara aktif mengungkapkan aktivitas tersebut dalam laporan tahunan atau sustainability report. Pengungkapan ini tidak semata-mata bersifat informatif, melainkan juga merupakan upaya untuk membentuk persepsi publik agar melihat perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ketika perusahaan menghadapi isu reputasi, seperti tuduhan penghindaran pajak, pelaporan CSR dapat digunakan sebagai mekanisme simbolik untuk menegaskan kesesuaian nilai perusahaan dengan nilai sosial yang diharapkan (Deegan, 2002). Dalam hal ini,

CSR tidak hanya bersifat substantif tetapi juga strategis untuk melindungi legitimasi institusional.

Teori legitimasi juga berkaitan dengan dampak keuangan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika legitimasi terjaga, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Sebaliknya, hilangnya legitimasi akibat praktik penghindaran pajak atau kegagalan CSR dapat menimbulkan risiko reputasi, penurunan nilai saham, bahkan boikot pasar. Oleh karena itu, strategi pengelolaan legitimasi melalui CSR menjadi penting dalam konteks keberlanjutan keuangan perusahaan (Cho, Laine, Roberts, & Rodrigue, 2015). Teori legitimasi, dalam hal ini, membantu menjelaskan bagaimana perusahaan berusaha menjaga keseimbangan antara tekanan pasar, harapan publik, dan kepentingan internal.

b. Teori Agency

Teori agensi merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu keuangan dan akuntansi yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal (pemilik saham) dan agen (manajer) dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat menimbulkan biaya agensi, yaitu biaya yang timbul karena perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, manajer sebagai agen memiliki informasi dan kendali lebih besar terhadap operasional perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menerapkan mekanisme pengawasan, transparansi, dan insentif yang dapat menyelaraskan kepentingan agen dan

prinsipal. Salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan secara terbuka, termasuk melalui pelaporan CSR.

Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi menjelaskan bahwa manajer dapat memiliki insentif untuk menurunkan beban pajak sebagai strategi meningkatkan laba bersih, yang pada akhirnya memengaruhi bonus atau kompensasi mereka. Namun demikian, tindakan penghindaran pajak yang agresif dapat meningkatkan risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak, serta menimbulkan kerusakan reputasi perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Oleh karena itu, manajer harus menyeimbangkan antara kepentingan pribadi mereka dengan ekspektasi pemilik saham terhadap keberlanjutan perusahaan. Dalam beberapa kasus, penghindaran pajak dapat dilakukan dalam batas legal, tetapi tanpa keterbukaan, tindakan ini tetap memunculkan asimetri informasi yang berpotensi merugikan prinsipal. Di sinilah pentingnya pengungkapan dan tata kelola yang baik sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik agensi.

Kinerja CSR juga dapat dijelaskan melalui perspektif agensi, di mana manajer menggunakan CSR sebagai alat untuk membangun citra positif perusahaan sekaligus mengurangi tekanan dari pemangku kepentingan eksternal. Di sisi lain, CSR dapat pula digunakan sebagai alat justifikasi oleh manajer yang ingin mengalihkan perhatian publik dari tindakan yang tidak menguntungkan pemegang saham, seperti penghindaran pajak atau pemborosan sumber daya (Barnea & Rubin, 2010). Maka dari itu, kegiatan CSR yang tidak disertai dengan akuntabilitas dan transparansi dapat memperbesar biaya agensi karena menimbulkan informasi yang

menyesatkan bagi investor. Namun, CSR juga dapat menjadi mekanisme pengawasan tidak langsung, di mana perusahaan yang aktif secara sosial diasumsikan memiliki tata kelola yang baik dan risiko yang lebih rendah.

Terkait dampak keuangan perusahaan, teori agensi menekankan bahwa praktik tata kelola yang baik, termasuk pengelolaan pajak dan pelaporan CSR yang transparan, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur pengawasan yang kuat cenderung mampu meminimalisasi konflik agensi dan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang (Fama & Jensen, 1983). Sebaliknya, perusahaan yang tidak transparan dalam praktik CSR dan strategi fiskalnya akan menghadapi risiko penurunan nilai saham serta penarikan investasi oleh pemegang saham yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan secara cermat dampak keuangan dari keputusan mereka dalam konteks relasi agensi. Dalam hal ini, teori agensi menyediakan landasan untuk memahami pentingnya pengawasan, pengungkapan, dan insentif yang selaras dalam mendukung keberlanjutan bisnis.

2. Kinerja CSR

a. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. CSR tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sosial yang lebih luas. Menurut Brigham dan Houston (2011), CSR adalah kebijakan dan tindakan perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab

sosial terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dengan kata lain, CSR berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungannya agar tercapai kesinambungan jangka panjang.

Dalam konteks manajemen keuangan, kinerja CSR menjadi bagian penting dalam strategi korporasi yang berkaitan langsung dengan reputasi dan nilai perusahaan. Agus Sartono (2016) menyatakan bahwa CSR yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan pencapaian keuntungan finansial dan kontribusi sosialnya cenderung lebih berkelanjutan dan menarik bagi investor. Kinerja CSR yang baik juga dapat mengurangi risiko bisnis yang berasal dari tekanan sosial dan regulasi, serta meningkatkan loyalitas konsumen. Oleh sebab itu, CSR bukan sekadar kewajiban etis, melainkan juga strategi bisnis jangka panjang.

b. Pengukuran Kinerja CSR (CSR Disclosure Index GRI 4.0)

Kinerja CSR dapat diukur melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan pedoman internasional yang membantu perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan secara sistematis dan transparan. Salah satu versi yang banyak digunakan dalam penelitian adalah GRI 4.0, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial (termasuk tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk). Menurut Hanafi (2016), pengungkapan informasi CSR

melalui pedoman GRI memungkinkan para pemangku kepentingan menilai sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara komprehensif.

Pengukuran *CSR Disclosure Index* biasanya dilakukan dengan metode content analysis, yaitu mencocokkan item-item pengungkapan yang tersedia di laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan dengan daftar item yang tercantum dalam GRI 4.0. Setiap item diberi skor, misalnya 1 jika diungkapkan, dan 0 jika tidak. Kemudian, indeks dihitung dengan membandingkan total item yang diungkapkan dengan jumlah item keseluruhan yang menjadi acuan (91 item).

Rumus adalah sebagai berikut:

$$CSR\ Disclosure\ Index = \text{total item yang diungkapkan} / \text{jumlah item total}$$

Kasmir (2014) menjelaskan bahwa pendekatan ini bersifat kuantitatif dan memberikan gambaran objektif mengenai keterbukaan informasi CSR suatu perusahaan. Indeks ini digunakan dalam banyak studi untuk menilai dampak CSR terhadap kinerja keuangan, efisiensi manajerial, hingga strategi pajak perusahaan.

3. Penghindaran Pajak

a. Definisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara dengan cara-cara yang sah menurut hukum. Menurut Brigham dan Houston (2011), penghindaran pajak termasuk dalam strategi manajemen keuangan perusahaan dalam upaya efisiensi biaya, yaitu dengan mengurangi beban pajak melalui perencanaan yang cermat tanpa melanggar peraturan perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik penghindaran pajak sering dikritik

karena dianggap bertentangan dengan semangat keadilan dan etika fiskal, terutama ketika dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk menyiasati celah-celah hukum. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi isu penting dalam manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan.

Dalam perspektif keuangan korporasi, penghindaran pajak menjadi bagian dari keputusan strategis yang dapat memengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan. Sartono (2016) menyatakan bahwa manajer keuangan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola kewajiban pajaknya secara efisien. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut adalah tax planning, termasuk penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor legal. Akan tetapi, praktik ini dapat berdampak pada reputasi perusahaan jika tidak diimbangi dengan transparansi dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, penghindaran pajak harus dilihat bukan hanya dari sisi hukum dan efisiensi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan tanggung jawab korporasi.

b. Pengukuran Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan indikator paling umum digunakan dalam penelitian. ETR mencerminkan tingkat efektivitas pembayaran pajak perusahaan dan dihitung dengan membandingkan beban pajak yang dilaporkan dengan laba sebelum pajak. Rumus ETR adalah:

$$\text{ETR} = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Kasmir (2014) menjelaskan bahwa ETR menunjukkan seberapa besar proporsi laba yang dibayarkan sebagai pajak; semakin rendah ETR suatu

perusahaan, semakin besar indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan tax avoidance. Nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak resmi menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk menekan beban fiskalnya. Oleh karena itu, ETR sering dijadikan proksi utama dalam mengukur tingkat penghindaran pajak dalam laporan keuangan.

Sementara itu, Hanafi (2016) menambahkan bahwa penggunaan ETR sebagai alat analisis dalam keuangan perusahaan sangat berguna untuk menilai efektivitas manajemen pajak. ETR yang stabil dan sesuai dengan tarif pajak berlaku menunjukkan kepatuhan fiskal, sedangkan ETR yang rendah dan fluktuatif dapat menjadi sinyal adanya manajemen laba atau praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian empiris, ETR dapat dihitung dari data laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan publik yang tersedia secara terbuka. ETR juga sering digunakan dalam studi yang mengaitkan penghindaran pajak dengan kinerja CSR dan indikator keuangan lainnya, seperti ROE, karena berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal dan etika bisnis perusahaan.

4. Kinerja Keuangan

a. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Brigham dan Houston (2011), kinerja keuangan mencerminkan hasil akhir dari keputusan manajerial yang terkait dengan pembiayaan, investasi, dan pengelolaan aset perusahaan. Evaluasi kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai tujuannya dalam

menciptakan nilai bagi pemegang saham dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Informasi ini penting tidak hanya bagi manajemen internal, tetapi juga bagi pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator.

Dalam konteks strategis, Sartono (2016) menekankan bahwa kinerja keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk investasi, pembiayaan, maupun distribusi dividen. Kinerja yang baik menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selain itu, menurut Hanafi (2016), kinerja keuangan yang optimal akan meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja keuangan menjadi proses penting yang harus dilakukan secara periodik dan berbasis data yang dapat dipercaya, yaitu laporan keuangan perusahaan.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *Return on Equity* (ROE). ROE mencerminkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan terhadap jumlah ekuitas pemegang saham. Dengan kata lain, ROE mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Menurut Kasmir (2014), ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan, sehingga semakin menarik bagi investor. ROE dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Ekuitas}$$

Harjito dan Martono (2010) menyatakan bahwa ROE merupakan ukuran profitabilitas yang relevan untuk menilai kinerja keuangan jangka menengah hingga jangka panjang karena berhubungan langsung dengan nilai pemegang saham. Selain itu, Husnan dan Pudjiastuti (2015) menjelaskan bahwa ROE juga digunakan dalam analisis fundamental untuk mengevaluasi kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Dalam penelitian empiris, ROE sering dijadikan variabel independen dalam mengukur pengaruh kinerja keuangan terhadap keputusan manajerial seperti kebijakan CSR, penghindaran pajak, atau struktur modal. Dengan demikian, ROE tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur internal, tetapi juga sebagai sinyal eksternal yang mencerminkan kapabilitas dan integritas perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya.

5. Leverage

a. Definisi Leverage

Leverage merupakan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari utang dalam struktur modal perusahaan untuk meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham. Menurut Brigham dan Houston (2011), leverage mengukur seberapa besar perusahaan mendanai asetnya dengan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Leverage yang optimal dapat meningkatkan keuntungan pemilik perusahaan karena adanya efek pengganda terhadap laba, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko keuangan jika tidak dikendalikan secara tepat. Oleh karena itu, manajemen harus berhati-hati dalam menentukan proporsi utang dan ekuitas agar tidak membebani arus kas dan kemampuan membayar kewajiban jangka panjang.

Sartono (2016) menyatakan bahwa leverage tidak hanya berdampak pada struktur modal, tetapi juga memengaruhi keputusan manajemen, termasuk dalam pengambilan risiko bisnis dan investasi. Penggunaan utang yang tinggi dapat memaksa manajemen untuk lebih disiplin dalam penggunaan dana, tetapi jika terlalu besar, justru dapat memperbesar kemungkinan kebangkrutan. Menurut Hanafi (2016), leverage menjadi indikator penting dalam analisis keuangan karena dapat digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Selain itu, leverage juga mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko keuangan dan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor dan kreditor sebelum menanamkan dana.

b. Pengukuran Leverage

Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER menggambarkan proporsi antara total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Menurut Kasmir (2014), DER menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang ditanamkan oleh pemilik. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang, yang bisa meningkatkan risiko gagal bayar, sedangkan DER yang terlalu rendah bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak memaksimalkan manfaat dari pembiayaan eksternal. Rumus DER secara umum adalah:

$$\text{DER} = \text{Total Ekuitas} / \text{Total Utang}$$

Harjito dan Martono (2010) menjelaskan bahwa DER menjadi alat penting dalam menganalisis struktur modal perusahaan dan tingkat kesehatan keuangan

secara keseluruhan. Sementara itu, Husnan dan Pudjiastuti (2015) menyebutkan bahwa DER juga digunakan oleh pihak eksternal seperti bank dan investor untuk menilai kelayakan pinjaman atau investasi. Dalam praktiknya, DER digunakan sebagai variabel kontrol dalam banyak penelitian keuangan, termasuk untuk melihat hubungan antara struktur modal dan kebijakan perusahaan seperti penghindaran pajak, pelaporan CSR, serta kinerja keuangan. Sujarweni (2017) menambahkan bahwa DER yang ideal bervariasi antar industri, tetapi secara umum, perusahaan harus menjaga rasio ini dalam batas yang wajar agar tetap sehat secara finansial.

6. Likuiditas

a. Definisi Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Menurut Brigham dan Houston (2011), likuiditas mencerminkan kapasitas perusahaan untuk membayar kewajiban utang lancar tanpa harus menjual aset tetap atau mendapatkan pembiayaan tambahan. Dengan kata lain, likuiditas menunjukkan seberapa cepat dan mudah suatu aset dapat dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kewajiban segera. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang baik dianggap lebih stabil dan mampu menjalankan operasional harian tanpa gangguan keuangan.

Sartono (2016) menambahkan bahwa likuiditas merupakan salah satu aspek penting dalam analisis keuangan karena menjadi indikator awal atas kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka pendek. Jika perusahaan tidak mampu

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hal ini dapat berdampak pada reputasi bisnis, hubungan dengan kreditor, serta kelangsungan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan aset lancar yang efisien dan pencatatan kewajiban secara akurat sangat penting untuk menjaga kondisi likuiditas yang sehat. Manajemen yang baik akan selalu memantau posisi likuiditas agar perusahaan tetap berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan terpercaya.

b. Pengukuran Likuiditas

Salah satu alat ukur paling umum untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan adalah *Current Ratio* (CR) atau rasio lancar. *Current Ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Menurut Kasmir (2014), *Current Ratio* dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \text{Utang Lancar} / \text{Aset Lancar}$$

Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama dalam laporan keuangan karena memberikan informasi yang langsung terkait dengan posisi kas dan keamanan operasional jangka pendek perusahaan.

Harjito dan Martono (2010) menyatakan bahwa *Current Ratio* yang terlalu tinggi juga tidak selalu menunjukkan kondisi keuangan yang efisien, karena bisa jadi menunjukkan penumpukan kas atau aset lancar yang tidak produktif. Sementara itu, Husnan dan Pudjiastuti (2015) menjelaskan bahwa idealnya perusahaan memiliki *Current Ratio* minimal 2:1, tergantung pada karakteristik

industri. Dalam konteks penelitian, *Current Ratio* sering dijadikan sebagai variabel kontrol dalam menguji hubungan antara penghindaran pajak, kinerja CSR, dan kinerja keuangan. Sujarweni (2017) juga menyebutkan bahwa rasio ini penting dalam penilaian awal kelayakan kredit serta dalam analisis tren keuangan perusahaan dari tahun ke tahun.

7. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja modal atau *Capital Expenditure* (Capex) adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap baru, memperbaiki, atau memperpanjang umur ekonomis aset yang sudah ada. Menurut Brigham dan Houston (2011), belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pengeluaran ini mencakup pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, serta pembaruan teknologi. Dalam laporan keuangan, belanja modal tidak langsung dicatat sebagai beban, tetapi dikapitalisasi dan disusutkan sesuai umur manfaat asetnya.

Menurut Sartono (2016), keputusan investasi dalam belanja modal merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan karena menyangkut alokasi dana yang besar dan berisiko. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan Capex agar tidak membebani arus kas perusahaan di masa mendatang. Belanja modal juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan karena menentukan kapasitas produksi dan efisiensi operasional jangka panjang. Jika tidak dikelola dengan tepat, belanja modal yang besar dapat mengganggu likuiditas atau menimbulkan pembiayaan utang yang tidak efisien.

b. Pengukuran Belanja Modal

Belanja modal dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melihat nilai *Capital Expenditure* (Capex) yang tercantum dalam laporan arus kas pada aktivitas investasi. Menurut Hanafi (2016), Capex biasanya dihitung dari penambahan aset tetap dikurangi dengan aset tetap yang dilepas, atau dengan melihat langsung laporan arus kas bagian investasi. Dalam konteks penelitian, Capex sering dinyatakan sebagai persentase dari total aset atau terhadap penjualan bersih untuk membandingkan antara perusahaan. Rumus Capex adalah :

$$\text{Capex Ratio} = \text{Belanja Modal} / \text{Total Aset}$$

Kasmir (2014) menyebutkan bahwa belanja modal yang proporsional mencerminkan strategi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Di sisi lain, Harjito dan Martono (2010) menekankan bahwa pengeluaran Capex yang terlalu tinggi tanpa disertai efisiensi bisa membebani biaya depresiasi dan menurunkan profitabilitas. Husnan dan Pudjiastuti (2015) menambahkan bahwa belanja modal juga menjadi salah satu indikator dalam analisis fundamental yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha. Dalam penelitian, Capex sering digunakan sebagai variabel kontrol karena dapat memengaruhi hubungan antara kebijakan manajemen seperti penghindaran pajak dan pelaporan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Sujarweni (2017) juga menegaskan bahwa pengukuran Capex penting dalam mengevaluasi efektivitas keputusan investasi jangka panjang.

8. Biaya Pendanaan Bank

a. Pengertian Biaya Pendanaan Bank

Biaya pendanaan bank, yang sering disebut sebagai biaya bunga atau biaya keuangan, adalah beban yang harus ditanggung perusahaan atas penggunaan dana pinjaman dari lembaga keuangan, khususnya bank. Menurut Brigham dan Houston (2011), biaya pendanaan merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman atas risiko dan kesempatan yang diberikan selama dana tersebut digunakan. Biaya ini termasuk dalam komponen beban tetap yang harus dibayarkan secara periodik dan dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan, biaya bunga menjadi penting karena menyangkut keputusan struktur modal dan efisiensi pembiayaan.

Sartono (2016) menyatakan bahwa biaya pendanaan merupakan bagian dari struktur biaya modal perusahaan yang harus diperhitungkan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Jika biaya pendanaan terlalu tinggi, hal ini dapat membebani arus kas perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memilih sumber dana yang paling efisien dan sesuai dengan karakteristik proyek yang dibiayai. Selain itu, Hanafi (2016) menegaskan bahwa keputusan pendanaan yang optimal adalah yang mampu meminimalkan biaya modal secara keseluruhan, termasuk biaya pinjaman dari bank.

b. Pengukuran Biaya Pendanaan Bank

Pengukuran biaya pendanaan bank umumnya dilakukan dengan melihat biaya bunga (interest expense) yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Kasmir (2014) menjelaskan bahwa biaya bunga dapat dihitung dalam bentuk rasio, misalnya *Cost of Debt Ratio* atau beban bunga terhadap total Aset. Pengukuran ini

berguna untuk mengetahui tingkat beban bunga relatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional. Selain itu, dalam beberapa penelitian, biaya pendanaan juga dihitung sebagai persentase dari penjualan atau aset, guna melihat proporsinya terhadap aktivitas operasional. Rumus *Cost of Debt Ratio* adalah:

$$\text{Cost of Debt (COD)} = \text{Biaya bunga} / \text{Total Aset}$$

Harjito dan Martono (2010) menyatakan bahwa semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan, semakin tinggi risiko keuangan yang dihadapi, terutama jika pendapatan tidak mampu menutupi biaya tetap tersebut. Husnan dan Pudjiastuti (2015) menambahkan bahwa biaya pendanaan bank juga dapat dijadikan variabel dalam menilai efisiensi penggunaan utang dan dampaknya terhadap kinerja keuangan atau kebijakan sosial perusahaan seperti CSR. Dalam konteks penelitian, biaya pendanaan sering digunakan sebagai variabel independen atau kontrol untuk menguji hubungan antara struktur pembiayaan dan berbagai indikator kinerja. Sujarweni (2017) menekankan pentingnya pengungkapan biaya keuangan secara transparan agar stakeholder dapat menilai risiko pembiayaan dan keberlanjutan usaha perusahaan secara lebih objektif.

2.1.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama
1	Hoi, et al. (2013)	Menilai apakah perusahaan dengan aktivitas CSR rendah cenderung melakukan penghindaran pajak.	Kuantitatif; data perusahaan publik AS; regresi hubungan skor CSR-ETR.	Perusahaan dengan ETR efektif rendah (tax avoidance tinggi) umumnya memiliki skor CSR lebih rendah, mencerminkan orientasi manajerial oportunistik.
2	Huseynov & Klamm (2012)	Menguji keterkaitan manajemen pajak (ETR & ukuran agresivitas lain) dengan tingkat pengungkapan CSR.	Kuantitatif; perusahaan publik AS; regresi multivariat.	Penghindaran pajak berkorelasi negatif dengan kinerja CSR; perusahaan yang lebih agresif pajak cenderung berpartisipasi lebih sedikit dalam aktivitas sosial.
3	Lanis & Richardson (2012)	Memeriksa hubungan antara skor pengungkapan CSR dan agresivitas pajak di Australia.	Kuantitatif; regresi linier berganda pada data perusahaan publik AU.	Tingkat CSR tinggi berhubungan negatif dengan agresivitas pajak; perusahaan berorientasi etis cenderung kurang agresif menghindari pajak.
4	López-González et al. (2019)	Mengeksplor dampak strategi penghindaran pajak terhadap mutu pelaporan CSR di MNC.	Kuantitatif; regresi pada laporan keuangan & keberlanjutan multinasional lintas negara.	Semakin agresif tax avoidance, semakin rendah kualitas pelaporan CSR, mengindikasikan orientasi jangka pendek atas laba.

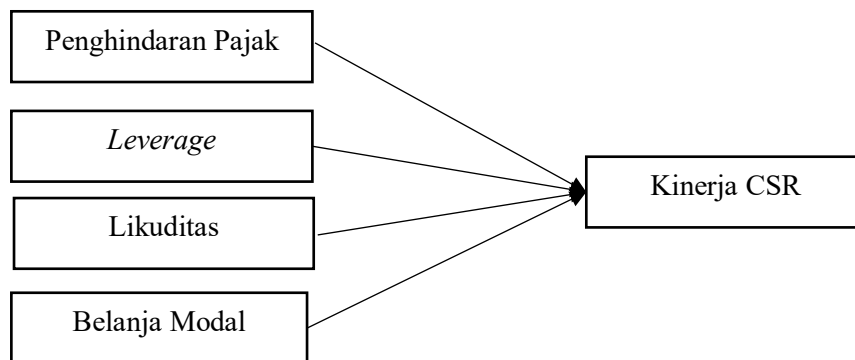
No	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama
5	Lin et al. (2017)	Menilai hubungan CSR –tax avoidance dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan di Tiongkok.	Panel data; regresi pada perusahaan publik sub-nasional.	Di wilayah lembaga hukum lemah, CSR kerap dipakai untuk menyamarkan strategi penghindaran pajak.
6	Gulzar et al. (2018)	Menguji pengaruh aktivitas CSR terhadap tax avoidance di perusahaan Tiongkok.	Panel data; regresi pada laporan tahunan & CSR.	Perusahaan dengan pengungkapan CSR luas mampu membentuk citra positif yang menutupi kebijakan pajak agresif.
7	Pratiwi & Djakman (2017)	Menganalisis peran koneksi politik dalam hubungan CSR –tax avoidance di Indonesia.	Kuantitatif; regresi linier pada data perusahaan publik.	Skor CSR tinggi terkait intensitas tax avoidance lebih besar, khususnya pada perusahaan berkoneksi politik kuat.
8	Liu & Lee (2019)	Meneliti efek CSR terhadap manajemen laba dan tax avoidance di perusahaan Tiongkok.	Panel data; regresi multivariat.	Aktivitas CSR tinggi membantu perusahaan membangun reputasi guna menutupi praktik manajemen laba dan penghindaran pajak.
9	Abdelfattah & Aboud (2020)	Mengkaji hubungan tax avoidance, tata kelola, dan CSR di bursa Mesir.	Panel data; regresi pada perusahaan terdaftar Mesir.	Perusahaan berstrategi pajak agresif menggunakan CSR sebagai sarana legitimasi untuk

No	Peneliti & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Utama
				menurunkan risiko reputasi.
10	Esteban-Sanchez, et al. (2017)	Menilai hubungan CFP, beban keuangan, dan CSR pada bank Eropa.	Panel data; regresi pada laporan keuangan & keberlanjutan.	Profitabilitas tinggi mendorong pelaporan CSR; beban keuangan besar menekan pengeluaran CSR.
11	Li et al. (2018)	Meneliti pengaruh pengungkapan ESG pada nilai perusahaan dan peran kekuatan CEO di Tiongkok.	Kuantitatif; regresi multivariat pada data ESG & keuangan.	Kinerja keuangan tinggi memotivasi pengungkapan ESG ; leverage & beban bunga tinggi menekan intensitas pelaporan CSR.

2.2.Kerangka Pemikiran

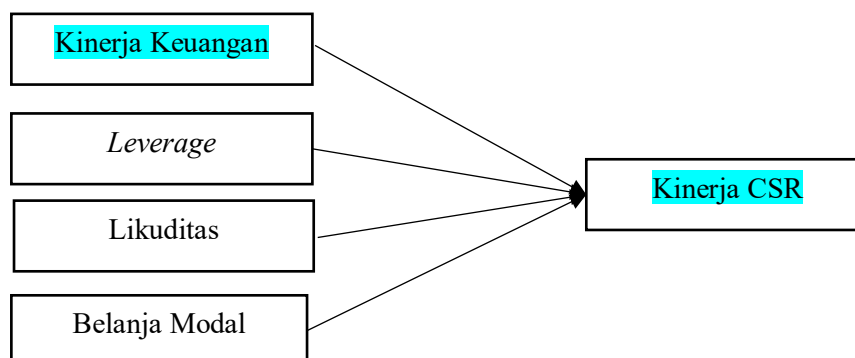
1. Kerangka Pemikiran 1

Kerangka Pemikiran pertama menggambarkan hubungan antara Penghindaran Pajak (ETR) sebagai variabel independen dan Kinerja CSR (*CSR Disclosure Index* berbasis GRI 4.0) sebagai variabel dependen. Model ini menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung terpengaruh secara etika dan reputasi, yang dapat tercermin dalam tingkat pengungkapan CSR-nya. Terdapat pula pengaruh yang diperhitungkan dari variabel kontrol seperti Leverage, Likuiditas, dan Belanja Modal, karena ketiganya dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan pengungkapan CSR. Model ini berupaya menguji apakah manajemen menggunakan CSR sebagai strategi legitimasi atas praktik penghindaran pajak.



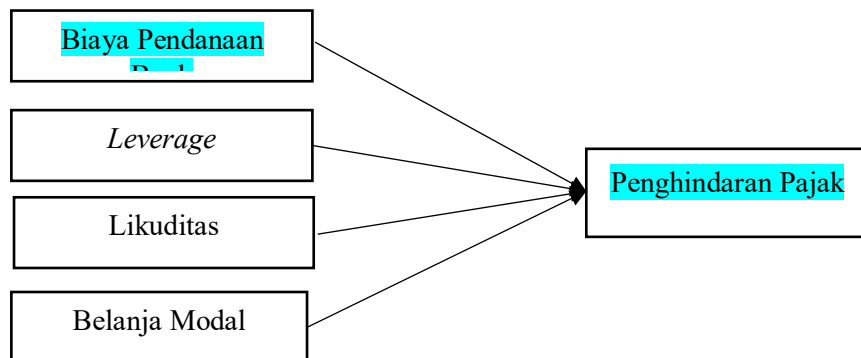
2. Kerangka Pemikiran 2

Kerangka pemikiran kedua menguji pengaruh Kinerja Keuangan (ROE) terhadap Kinerja CSR (CSR Disclosure Index GRI 4.0). Dalam model ini diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam program tanggung jawab sosial. ROE digunakan sebagai indikator efisiensi dan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki, yang diharapkan berdampak positif terhadap komitmen CSR. Variabel kontrol Leverage, Likuiditas, dan Belanja Modal digunakan untuk menyesuaikan efek finansial lainnya yang mungkin memengaruhi hubungan ini.



3. Kerangka Konseptual 3

Kerangka konseptual ketiga membahas pengaruh Biaya Pendanaan Bank (*Cost of Debt*) terhadap Kinerja CSR (*CSR Disclosure Index GRI 4.0*). Kerangka ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan dengan biaya pendanaan yang tinggi memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan sosial karena beban keuangannya yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan biaya utang yang lebih rendah mungkin memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi dalam praktik CSR. Dalam hubungan ini, Leverage, Likuiditas, dan Belanja Modal tetap digunakan sebagai variabel kontrol karena dapat memengaruhi kemampuan finansial perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sosial.



2.3.Hipotesis

Dalam penelitian ini, hanya tiga hipotesis utama yang menjadi fokus analisis, di mana masing-masing hipotesis merefleksikan secara langsung kerangka pemikiran teoritis yang telah dibangun sebelumnya. Ketiga hipotesis tersebut disusun berdasarkan hubungan antarvariabel yang secara konseptual dianggap memiliki relevansi signifikan terhadap isu penghindaran pajak, kinerja keuangan, biaya pendanaan dan kinerja tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemilihan

untuk merumuskan hanya tiga hipotesis utama didasarkan pada pertimbangan akademik dan fokus penelitian yang diarahkan pada pengujian hubungan kausal antara variabel bebas utama terhadap variabel dependen, tanpa mengalihkan perhatian pada pengujian terhadap variabel kontrol. Dengan demikian, variabel-variabel kontrol seperti *leverage*, likuiditas, dan belanja modal tetap dimasukkan dalam model regresi untuk menjaga validitas internal dan mengeliminasi kemungkinan bias, tetapi tidak dijadikan objek pengujian hipotesis secara eksplisit.

2.3.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kinerja CSR

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering kali dipandang sebagai strategi manajerial yang bertentangan dengan prinsip etika korporasi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, Teori Legitimasi menjadi kerangka utama yang menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja CSR. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan berupaya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui tindakan-tindakan yang dianggap dapat meningkatkan citra positif mereka, termasuk melalui pengungkapan CSR (Suchman, 1995). Namun, ketika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, hal ini justru dapat merusak legitimasi sosial karena dianggap menghindari kontribusi pada pembangunan publik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance* cenderung memiliki tingkat kinerja CSR yang lebih rendah karena aktivitas tersebut tidak sejalan dengan ekspektasi masyarakat tentang perusahaan yang bertanggung jawab.

Penelitian empiris mendukung pandangan bahwa terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan kinerja CSR. Studi Hoi et al. (2013) menunjukkan

bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak tinggi cenderung menunjukkan kinerja CSR yang rendah, mengindikasikan adanya orientasi manajemen yang oportunistik dan minim perhatian terhadap nilai-nilai sosial. Huseynov dan Klamm (2012), serta Lanis dan Richardson (2012) juga menemukan hasil serupa, yaitu bahwa *tax avoidance* mengurangi insentif perusahaan untuk berinvestasi dalam aktivitas sosial karena fokus utama perusahaan beralih pada efisiensi pajak dan keuntungan internal. Bahkan, dalam konteks lintas negara, López-González et al. (2019) menegaskan bahwa strategi penghindaran pajak menurunkan kualitas CSR, khususnya pada perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dan CSR berada dalam dua spektrum yang berbeda: satu mendorong keuntungan jangka pendek, sementara yang lain menekankan keberlanjutan dan kepatuhan moral.

Berdasarkan teori dan temuan sebelumnya, maka diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan, semakin rendah pula kinerja CSR-nya. Artinya, perusahaan yang tidak berkomitmen untuk berkontribusi terhadap sistem perpajakan negara juga cenderung tidak menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial yang luas. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Kinerja CSR

2.3.2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kinerja CSR

Hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat dijelaskan melalui Teori Legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan terus berusaha membangun dan mempertahankan legitimasi

sosial di mata publik. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik akan lebih mampu memenuhi ekspektasi sosial melalui pelaksanaan kegiatan CSR. Esteban-Sanchez et al. (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas memberikan dorongan kuat bagi perusahaan-perusahaan di Eropa untuk lebih aktif melaporkan aktivitas CSR-nya. Demikian pula, Li et al. (2018) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja keuangan tinggi di Tiongkok cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi legitimasi dan pemenuhan harapan stakeholder.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan. Kinerja keuangan memberikan perusahaan kapasitas dan insentif yang lebih besar untuk menanggapi tekanan sosial dan pasar dengan berinvestasi dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja CSR

2.3.3. Pengaruh Biaya Pendanaan Bank terhadap Kinerja CSR

Hubungan antara biaya pendanaan bank (*Cost of Debt*) dan kinerja CSR dapat dijelaskan melalui Teori *Agency*, yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang utang. Dalam situasi di mana perusahaan memiliki beban bunga yang tinggi, manajer cenderung memprioritaskan penggunaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran bunga kepada kreditur, daripada mengalokasikan dana untuk aktivitas sosial atau lingkungan yang sifatnya jangka panjang. Beban biaya utang yang besar dapat menurunkan

fleksibilitas keuangan dan memperkecil ruang untuk membiayai kegiatan CSR. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat cost of debt yang tinggi cenderung akan mengurangi intensitas dan kualitas keterlibatan dalam CSR.

Selain itu, berdasarkan Teori Legitimasi, perusahaan perlu menyeimbangkan antara tuntutan pasar finansial dan harapan sosial. Namun, dalam kondisi keuangan yang tertekan akibat mahalnya biaya pendanaan dari bank, perusahaan cenderung mengalihkan fokus dari tanggung jawab sosial ke efisiensi finansial. Esteban-Sanchez et al. (2017) menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban keuangan tinggi cenderung mengurangi pengeluaran non-esensial seperti program CSR, karena dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap kelangsungan bisnis jangka pendek. Li et al. (2018) juga menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi dan beban bunga besar memperlihatkan tingkat pengungkapan CSR yang lebih rendah, sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya internal.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi biaya pendanaan bank (COD), semakin rendah tingkat kinerja CSR yang dilakukan perusahaan. Artinya, beban bunga yang tinggi menghambat kemampuan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik dari sisi kapasitas keuangan maupun insentif manajerial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Biaya Pendanaan Bank berpengaruh negatif terhadap Kinerja CSR